

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) YANG MELANGGAR
KESUSILAAN**

TESIS



Oleh :

SALMA INTAN SARASWATI

NIM. 1321900035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE) YANG MELANGGAR
KESUSILAAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Magister Hukum



Oleh:

SALMA INTAN SARASWATI

NIM. 1321900035

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) YANG
MELANGGAR KESUSILAAN**

Diajukan Oleh:

SALMA INTAN SARASWATI

NIM. 1321900035

Telah disetujui Pembimbing untuk diajukan:

Surabaya, 18 Agustus 2022

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Dr. Sri Setvadji, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

TESIS
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) YANG
MELANGGAR KESUSILAN

Diajukan Oleh:

SALMA INTAN SARASWATI
NIM. 1321900035

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal: 22 September 2022

Tim Penguji:

Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Ketua

Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
Anggota

Budiarsih, S.H., M.H., Ph.D
Anggota

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,MH

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Salma Intan Saraswati
NIM : 1321900035
Program : Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Oktober 2022

Hormat saya,



SALMA INTAN SARASWATI



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail: perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Intan Saraswati
NBI/NPM : 1321900035
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(CITE) YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Dengan **Hak Bebas Royalti (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal :

*Coret yang tidak perlu

Yang Menyatakan,

(.....)
Salma Intan Saraswati

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya maka penyusunan tesis dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) YANG MELANGGAR KESUSILAAN”** telah diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkat dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Tesis ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga selama penyusunan tesis ini.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menambah ilmu saya sebagai mahasiswa, pengalaman keilmuan, wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai hukum.
4. Staff Akademik di lingkungan Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dukungan dan bantuan kegiatan saya selama ini.
5. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA.,CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Teristimewa kedua orang tua saya Ibu Siti Saleha dan Almarhum Ayah Rahman Bunga yang selalu ada setiap saat dari kecil hingga dewasa, memberikan kasih sayang dan dukungan doa sehingga tesis ini selesai.
7. Kakak saya Sahman Husni yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Angkatan MH-43 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan kerendahan hati saya menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun penyajiannya sehingga saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Dan saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi saya.

Surabaya, 14 Oktober 2022



SALMA INTAN SARASWATI

ABSTRAK

Perkembangan teknologi membawa dampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana khususnya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana yang melanggar kesusilaan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Seperti Kasus Baiq Nuril Maknun yang seharusnya sebagai korban pelecehan seksual akan tetapi justru menjadi tersangka. Kasus Baiq Nuril Maknun benar-benar mendapat banyak perhatian dari masyarakat, akademisi bahkan Presiden. Kasus ini berawal dari Baiq Nuril Maknun seorang guru honorer di SMAN 7 Mataram yang merekam percakapan telepon kepala sekolahnya. Rekaman pembicaraan tersebut tersebar sehingga Baiq Nuril dilaporkan oleh kepala sekolah atas sangkaan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun analisis bahan hukum diuraikan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, *ratio decidendi* dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melanggar kesusilaan terjadinya pertimbangan hukum yang berbeda terhadap suatu kasus yang sama. Pengadilan Mataram memutus tidak bersalah, sedangkan MA tingkat Kasasi dan PK memutus bersalah. Keadilan baru didapatkan setelah adanya pemberian amnesti dari Presiden. Kedua, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) yang melanggar kesusilaan dimana korban mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam bentuk pemenuhan hak prosedural serta korban juga mendapatkan perlindungan dari Presiden dalam bentuk pemberian amnesti sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kesusilaan.

ABSTRACT

Technological developments have an impact on the development of law, including criminal law, especially criminal acts. Crimes that often occur in society are criminal acts that violate decency in the field of information and electronic transactions. Like the case of Baiq Nuril Maknun who was supposed to be a victim of sexual harassment but instead became a suspect. The Baiq Nuril Maknun case has received a lot of attention from the public, academics and even the President. This case began with Baiq Nuril Maknun, an honorary teacher at SMAN 7 Mataram, who recorded a telephone conversation with the principal of the school. The recording of the conversation was spread so that Baiq Nuril was reported by the school principal on suspicion of Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE).

This research uses normative legal research, the problem approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The analysis of legal materials is described using the deductive method.

The results of this study conclude that first, the ratio decidendi in criminal acts of information and electronic transactions (ITE) that violates morality the occurrence of different legal considerations in the same case. The Mataram court decided not guilty, while the Supreme Court at the Cassation and PK level decided guilty. Justice was only obtained after the granting of amnesty from the President. Second, legal protection for victims of criminal acts of information and electronic transactions (ITE) that violate decency where victims receive protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the form of fulfilling procedural rights and victims also receive protection from the President. in the form of granting amnesty as a protection for human rights.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Decency.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
1.5.1 Penelitian Terdahulu	9
1.5.2 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu	18
1.6 Metode Penelitian	20
1.6.1 Jenis Penelitian	20
1.6.2 Pendekatan Masalah	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	23
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	23
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP	25
2.1 Landasan Teori	25
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	25
2.1.2 Teori Keadilan.....	28
2.2 Penjelasan Konsep	34
2.2.1 Konsep Korban Tindak Pidana	34
2.2.2 Konsep Informasi dan Transaksi Elektronik.....	36
2.2.3 Pengertian Tindak Pidana Asusila	43
2.2.4 Konsep Kesusilaan Menurut UU ITE	45

2.2.5 Perbandingan Pengaturan Hukum Teknologi Informasi (<i>Cyberlaw</i>) di Indonesia dan Negara Lain	49
BAB III PEMBAHASAN	55
3.1 <i>Ratio Decidenci</i> dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang Melanggar Kesusilaan	55
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang Melanggar Kesusilaan	67
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	81
DAFTAR BACAAN	83